

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Menurut Syafiee (2006;13) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun dalam ukuran kecil.

The Liang Gie (dalam Syafiee, 2006;14) mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu

Administrasi adalah sistem pengetahuan dimana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang secara teratur bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut di atas administarasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.apabila diterapkan secara formal dalam organisasi majka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujua organisasi, dan salah satu organisasi yang terbesar adalah Negara.

Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan-kegiatan beberapa orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu bersama-sama sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pengertian yang telah diberikan oleh Pasolong mengatakan bahwa "Administrasi adalah pekerjaan terencana, tersusun yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atas dasar efektif, efisien dan rasional".

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie 2006;23) Administrasi publik ialah sebagai berikut:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat di definisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang

Definisi para ahli mengenai administrasi negara merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama didalam suatu organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi negara bergerak dalam organisasi pemerintahan untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan rapi melalui pelaksanaan kerja penyaluran bantuan oleh pihak-pihak yang terkait dan bekerja secara maksimal sehingga pada akhirnya menghasilkan penyaluran bantuan nelayan yang tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan.

2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat atau wadah dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi tersebut. .

Sedangkan John D Millet (dalam Siagian, 2003;51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama

Organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis interaction antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu (Siagian, 2003;96)

Menurut Tangkilisan (2005;132) Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;96) Sebagai berikut:

- a. Terdapat tujuan yang jelas.
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah
- e. Adanya kesatuan Perintah
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.

- g. Adanya pembagian tugas.
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
- i. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
- j. Adanya Jaminan jabatan.
- k. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
- l. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri organisasi yang diuraikan di atas digunakan sebagai acuan dalam menciptakan organisasi yang baik. Sehingga organisasi dapat sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.

Dalam aktifitas Tim Koordinasi penyaluran bantuan nelayan sebagai sebuah organisasi negara yang memiliki wewenang dan pembagian kerja pada ruang lingkupnya agar serius dalam meningkatkan penyaluran bantuan nelayan tradisional untuk nelayan miskin yang pelaksanaannya secara terencana, terstruktur guna mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti menengahi, mengendalikan, menguasai, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Antolillah (2010;14) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Mary Parker (dalam Handoko, 2008;3) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung

arti bahwa para manajermen capai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan

Adapun unsur-unsur manajemen dinyatakan dalam 6 M, Brantas (2009;13) *Man , Money Methids, Material, Machines, Markets*. Unsur-Unsur ini dijalankan sebagai suatu kepatutan terjadinya manajemen, dengan memiliki 6 kekuatan diatas menciptakan suatu pencapaian organisasi pada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut G.R. Terry (dalam Antholilah,2010;16) mengatakan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengerakkan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya manusia lainnya.

Sedangkan John D. Millet (dalam Syafie, 2006;49) mengatakan manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki,

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;28) manajemen merupakan suatu sub konsep tetapi pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa pergerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses berjalannya organisasi yang didalamnya terdapat manusia-manusia yang perlu diarahkan serta dibimbing dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam organisasi agar tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

Seorang pemimpin dalam fungsinya untuk menjalankan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan dengan melibatkan kegiatan orang lain.

Konsep manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi.

Keterkaitan antara Organisasi, Administrasi, dan Manajemen dijelaskan oleh Waldo (dalam Zulkifli, 2009;18) yaitu organisasi diibaratkan sebagai anatomi dari pada administrasi, sedangkan manajemen sebagai fisiologinya, organisasi menunjukkan struktur dari pada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya, keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu dari pada yang lain.

Menurut Siagian (2010;38) mengatakan bahwa fungsi manajemen itu ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberian motivasi
4. Pengawasan
5. Mengevaluasi

Menurut Antholilah (2010;110) mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah :

1. Pengorganisasian
2. Berkoordinasi
3. Mengendalikan
4. Mengevaluasi
5. Mengerakkan
6. Meramalkan
7. Merakit Sumber Daya
8. Mengarahkan dan Memerintah.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur

apa saja kegiatan yang ada didalam organisasi tersebut. Sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Brantas (2009;13) berpendapat bahwa ada lima fungsi penting diperlukannya manajemen, yaitu:

- a. Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi.
- b. Sumber legitimasi, tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, dan disamping itu, keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, pegawai, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumberdaya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
- c. Sumber motivasi, Tujuan organisasi berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi pegawai yang penting, dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota, fenomena ini tampak jelas dalam organisasi yang menawarkan bonus bagi pencapaian tingkat penjualan tertentu dan sebagainya yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan.
- d. Standar Pelaksanaan, memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi, setelah organisasi menerapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar, atau laba, derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur.
- e. Dasar rasional pengorganisasian, Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi, Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi.

Penjelasan yang diuraikan tadi, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah penggambaran proses kerja sama akan datang yang dilaksanakan secara prosedur dan terstruktur melalui anggota pekerja organisasi dan mereka saling berkaitan, Dalam prosesnya terdapat pengawasan yang

dilakukan oleh pimpinan guna memperkecil penyimpangan dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

4. Konsep Evaluasi

Menurut Antolillah (2010;115) Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas (Dunn, 2003;21)

Menurut Bryant dan White (dalam Kuncoro,1997;15) evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian hasil.

Anderson (dalam Arikunto,2000;1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2000;1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan

Bila dilihat dari fungsi Menurut Dun (2003;609) evaluasi memiliki fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakann, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.
2. evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga kritik menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternative sumber nilai (misalnya kepentingan kelompok) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).
3. evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu di definisikan ulang.

Dunn (2003;608) mengatakan gambaran utama evaluasi bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karekteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus Nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program, evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan

manfaat atau kegunaan sosialkebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. *Fakta Nilai (interpedensi)*. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai” untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
3. *Orientasi masa kini dan masa lampau*. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai. Nilai-nilai sering ditata dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Sudjana (2006;68) berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang di perlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana.

Menurut Ndraha dalam buku konsep administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha,2000;23). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Berkaitan dengan definisi evaluasi kebijakan terdapat indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik itu sebagai berikut.

Dalam Kriteria evaluasi dampak kebijakan publik penulis mengambil teori dari skripsi Randy Yusry yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kampar (studi Pada Unit Pelaksana teknis badan Pemadam kebakaran)”.

1. Efektivitas

Menurut Winarto (2002;184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan public ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan

tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan public hasilnya tidak efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan , semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* dengan tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Di tinjau dari pengertian efektifitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektifitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan .

Efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpeuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Menurut Winarto (2002:185) Efisiensi (*eficiensy*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan public

ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Menurut Winarto (2002;186) kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupa masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut masuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Menurut Winarto (2002;187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan di peroleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tersebut mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Menurut Winarto (2002;188) seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- (1) memaksimalkan kesejahteraan individu.
Analisis dapat berusaha untuk melaksanakan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- (2) melindungi kesejahteraan minimum.
Disini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagai orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- (3) memaksimalkan kesejahteraan bersih
Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat di gunakan untuk menggantikan bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu pemerataan.
- (4) memaksimalkan kesejahteraan redistributif
Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika mencapainya pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

5. Responsivitas

Menurut Winarto (2002;189) responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran

kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menggapai pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menggapai kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

6. Ketepatan

Winarto (2002;184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan nilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument, untuk meralisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap

pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan responsivitas dan ketetapan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

5. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Ndraha (2003 :498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Menurut Young & Quin Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak, (dalam Suharto, 2005;44).

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan prundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008;87) dalam buku berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan

pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran
2. Sumberdaya
Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

6. Konsep Pemberdayaan

Secara Konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. (Suharto, 2006;57)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. (Widjaja, 2003;169). Dalam [http:// www. Materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaa.html](http://www.Materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaa.html).

Suharto (2006;58–59) mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara

pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yakni :

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment*, guna meningkatkan nilai manusia (*human dignitiry*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya anantara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

7. Konsep Perencanaan Partisipatif

Dalam konsep perencanaan perspektif ini penulis mengambil teori dari skripsi Randy yusry yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kampar (studi Pada Unit Pelaksana teknis badan Pemadam kebakaran)”.

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002;81) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan

tanpamelibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003;16) ” usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri”.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003;25), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disipakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)
Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.
 - d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara *stakeholder*
5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
 - b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
 - c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisibilitas (Realistis)
Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Hal senada juga disampaikan Abe (2005;90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

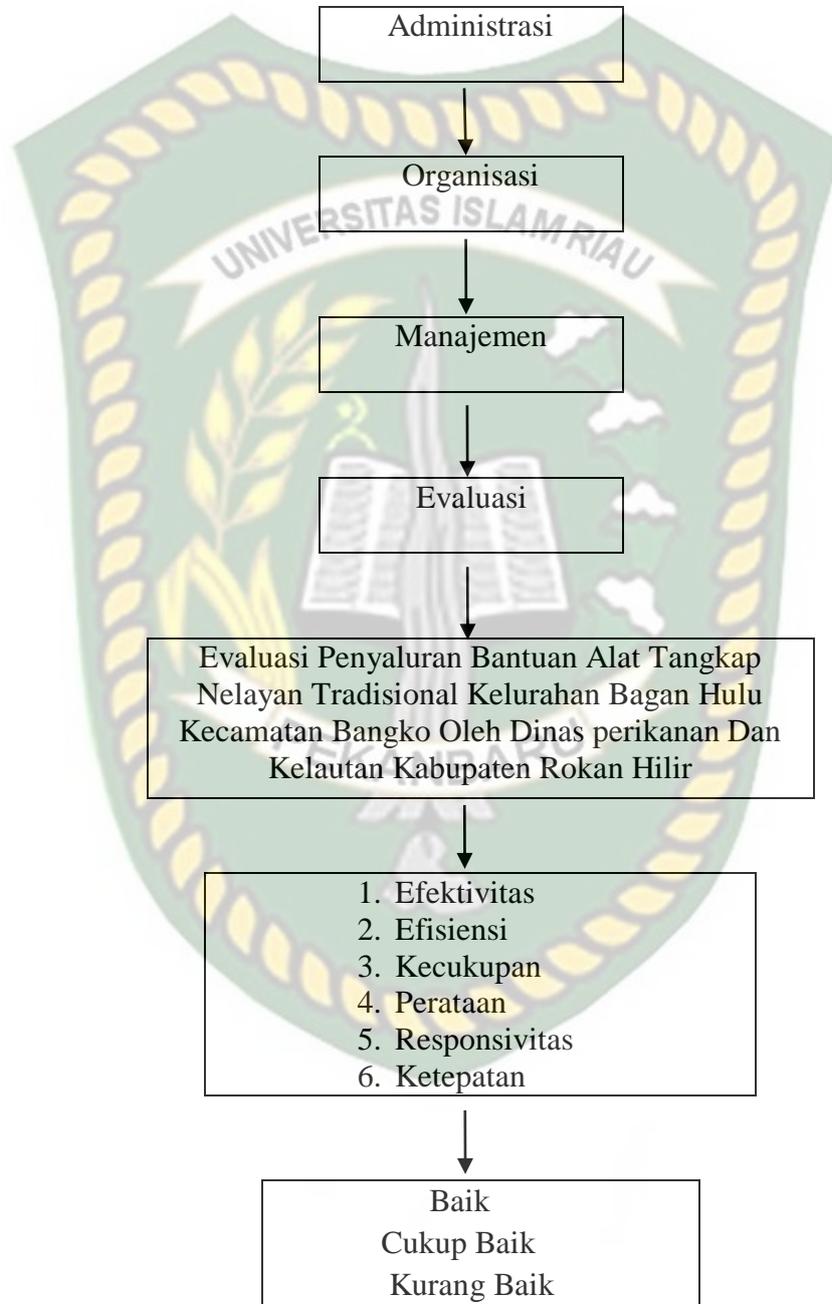
1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir dari bawah (*bottom up*) bukan lahir atas (*top-down*) atau Pemerintah Daerah Jadi perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*).

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini, adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.1.

Gambar II.1. Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018.

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni : di duga Mekanisme Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan baik sepenuhnya.

A. Konsep Operasional

Agar terciptanya suatu kesatuan pengertian dan keseragaman bahasa serta untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan dari beberapa istilah yang perlu dioperasikan terlebih dahulu dan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten rokan Hilir dalam penyaluran Bantuan alat tangkap Nelayan Tradisional .

- a. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
- b. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
- c. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian pengerakkan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya manusia lainnya.

- d. Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang perikanan dan kelautan.
- e. Evaluasi adalah proses perbandingan antara yang seharusnya (da solen) dengan yang senyatanya (das sein) dan analisi hasilnya.
- f. Evaluasi dalam penelitian ini adalah Evaluasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Banggko Oleh Dinas Periknan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- g. Penyaluran adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menyalurkan sesuatu melalui lembaga.
- h. Bantuan adalah barang yang di pakai untuk membantu, pertolongan atau sokongan.
- i. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- j. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di indonesia dibawah kecamatan. Dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- k. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di indonesia dibawah kabupaten atau kotaatay sebutan lain adalah wilayah kerja camat.
- l. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.

- m. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)
- n. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia, kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
- o. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam budidaya dengan alat atau cara apapun.
- p. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- q. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- r. Kecukupan (adequacy) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- s. Perataan menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

- t. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- u. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tertentu tersebut.
- v. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa/memiliki atas sesuatu kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan langsung olehnya.
- w. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
- x. Nelayan laut adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut.
- y. Belanja Bantuan sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- z. Pemohon bantuan sosial adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat, kelompok masyarakat, serta lembaga non pemerintahan.

B. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendiskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. N. Dun (2003:608)	Evaluasi penyaluran bantuan alat tangkap nelayan tradisional kelurahan bagan hulu kecamatan bangko oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten rokan hilir	1. Efektivitas	1. Nelayan Penerima Bantuan Alat Tangkap. 2. Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	1. Pendataan terhadap nelayan 2. Peninjauan ulang terhadap bantuan. 3. Adanya sanksi administratif.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kecukupan	1. Kepedulian nelayan untuk mengurus kartu nelayan 2. Identifikasi Calon penerima bantuan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Perataan	1. Perataan unit bantuan yang disalurkan 2. Keadilan Petugas dalam penyalurkan bantuan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Responsivitas	1. Kepuasan	Baik

1	2	3	4	5
		as	nelayan terhadap bantuan. 2. Meningkatkan pendapatan nelayan.	Cukup Baik Kurang Baik
		6. Ketepatan	1. Tepat waktu 2. Tepat Jumlah	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

C. Teknik pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu: Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik, untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kalautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

1. Efektivitas

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

2. Efisiensi

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

3. Kecukupan

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

4. Perataan

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

5. Responsivitas

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.

6. Ketepatan

Dapat dikatakan,

Baik : Apabila Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir hanya melaksanakan sebagian dari tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai indikator, berada pada interval rata-rata 1% - 33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau